



Integrasi Faktor Struktur dan Domestik dalam Kebijakan Jaringan Bersih 5G Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Donald Trump

Advenia Prihatini Widyaningrum, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The development of 5G technology has become a new realm in the technological competition between the United States and China. This technology competition focuses on competing for dominance of global core technologies, which can provide economic benefits through standard setting, patents, and global supply chains. Huawei, a technology company from China, is said to have dominated 5G development based on the number of patents and company spending on research and development of this internet network. The United States as a first-mover country that for decades has led the development of global internet network technology, is facing challenges with Huawei's rapid development in the development of 5G technology. The escalation of competition has increased with the designation of Huawei as a threat to the United States by President Donald Trump. The Clean Network policy initiative was also later issued by the Trump administration to block Huawei's 5G network in America. This initiative was also used to lobby allied countries to join this policy. This raises questions about the factors driving the establishment of the Clean Network policy as a response to United States' concerns about the leadership of Chinese tech companies in 5G development. This research uses Neoclassical Realism theory to explain the factors causing the choice of the Clean Network policy as the United States' response to pressure from the leadership of Chinese companies. This theory will combine the analysis of international and domestic structures in understanding the behavior of the United States.

Keywords: *5G Race, Trump, China, Clean Network, Neoclassical Realism*

PENDAHULUAN

Jaringan nirkabel generasi kelima, lebih dikenal sebagai 5G, merupakan teknologi seluler generasi terbaru yang disebut akan memberikan kecepatan data yang lebih besar, responsivitas yang lebih baik, dan kemungkinan untuk terhubung secara bersamaan ke lebih banyak perangkat serta semakin mempermudah berkembangnya IoT (*Internet of Things*). Pengembangan teknologi 5G sebagai revolusi dari generasi jaringan internet sebelumnya (4G) menjadi perdebatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Keduanya saling berlomba untuk menjadi negara yang mendominasi dalam pengembangan teknologi 5G yang nantinya dapat memiliki kekuasaan untuk menentukan penetapan standar, permasalahan paten, dan rantai pasokan global dari teknologi dan infrastruktur 5G. Persaingan menjadi semakin ketat karena diketahui bahwa Tiongkok saat ini telah memimpin dalam pengembangan 5G melalui investasi agresif dan dukungan yang kuat dari negara terhadap perkembangan teknologi melalui kebijakan nasional pemerintah.

Sejak tahun 2019, dua perusahaan teknologi asal Tiongkok yaitu Huawei dan ZTE menjadi yang teratas dalam pengembangan infrastruktur 5G di sejumlah negara di Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Perusahaan-perusahaan Tiongkok ini telah

memegang sekitar sepertiga dari *standard essential patent* (SEP) terkait teknologi 5G di seluruh dunia, dipimpin oleh Huawei yang memiliki portofolio SEP terbesar untuk teknologi 5G (Pohlmann, 2019). Kepemimpinan perusahaan teknologi ini ditambah dengan kekhawatiran Amerika Serikat yang telah berlangsung lama atas dugaan pencurian data dan kekayaan intelektual yang dilakukan perusahaan teknologi ini, serta diduga berhubungan dengan pemerintah Tiongkok telah meningkatkan kekhawatiran akan keamanan bagi Amerika Serikat. Untuk merespon kekhawatiran Amerika terhadap ekspansi teknologi 5G Tiongkok, pada tahun 2020 melalui Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, mengumumkan kebijakan *5G Clean Path* yang kemudian diperluas menjadi program *Clean Network* (U.S. Department of State, 2020).

Sudah terdapat beberapa riset pendahulu yang meneliti mengenai isu *5G race* antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini, yang digunakan artikel ini sebagai kajian literatur. Jurnal penelitian dari Bayuaji Pradipta Arinanda yang berjudul “Perang Dagang Amerika Serikat vs Tiongkok: Kebijakan Penolakan Teknologi 5G Tiongkok oleh Amerika Serikat” menganalisis kasus ini dengan menggunakan teori neorealisme aliran ofensif. Dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan penolakan teknologi 5G Tiongkok oleh Amerika Serikat disebabkan karena adanya perang dagang dan tindakan ini dilakukan sebagai salah satu cara dari Amerika Serikat untuk melindungi keamanan ekonomi domestik serta mempertahankan hegemoni terhadap penguasaan teknologi global (Arinanda et al., 2022). Adapula jurnal yang ditulis oleh Kim Mi-jin, Lee Heejin, dan Kwak Jooyoung yang berjudul “*The Changing Patterns of China’s International Standardization in ICT under Techno-nationalism: A Reflection through 5G Standardization.*” Penelitian dalam jurnal ini berfokus pada usaha Tiongkok untuk melakukan standarisasi dari teknologi 5G. Dimana argumen utamanya adalah bahwa kebijakan sains dan teknologi nasional Tiongkok, salah satunya mengenai teknologi 5G ini, telah merubah strategi nasional Tiongkok dari “*catch-up*” menjadi “*first-move*” dan akan terus bertransformasi dalam kerangka nasionalisme teknologi (Kim et al., 2020). Sementara itu, Andrew Stephen Champion, dalam jurnalnya yang berjudul “*From CNOOC to Huawei: securitization, the China threat, and critical infrastructure*” menggunakan teori sekuritisasi dari Mazhab Kopenhagen untuk menganalisis topik mengenai persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dimana, dalam tulisannya, Champion dengan menggunakan analisis diskursus menemukan bahwa Tiongkok telah ditunjuk sebagai ancaman eksistensial oleh Amerika Serikat sejak 2005 dengan *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) hingga yang terbaru mengenai Huawei (Champion, 2020).

Dari ketiga bacaan tersebut, terdapat kekosongan penelitian dalam melihat aspek analisis faktor domestik sebagai faktor yang menghubungkan tekanan sistem internasional dengan sikap penolakan Amerika Serikat terhadap teknologi 5G dari Tiongkok yang terlihat dari kebijakan yang diambil pemerintah Trump. Beberapa bacaan tersebut juga belum ada yang secara spesifik menganalisis mengenai kebijakan luar negeri untuk memproteksi jaringan internet 5G pada masa pemerintahan Donald Trump yang kemudian disebut *Clean Network*. Dengan kekosongan tersebut maka tulisan ini akan membawa analisis faktor domestik, disamping faktor struktural, dalam memahami penyebab pemerintah Trump melakukan penolakan terhadap jaringan 5G Tiongkok melalui kebijakan luar negeri *Clean Network*. Penelitian ini akan menggunakan model Realisme Neoklasik terhadap analisis kebijakan luar negeri dari Ripsman, Taliaferro dan Lobell (2016). Penelitian ini juga dapat menawarkan persepektif baru yaitu Realisme Neoklasik untuk menganalisis kebijakan luar negeri dalam isu

persaingan 5G antara Amerika Serikat dan Tiongkok

PEMBAHASAN

Perusahaan teknologi asal Tiongkok, Huawei, saat ini menjadi perusahaan yang terdepan dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur 5G secara global. Pada tahun 2019, Huawei telah mengendalikan 30% pasar teknologi 5G, dengan kepemilikan *standard essential patent* (SEP) menjadi 1.554 portofolio. Selain itu, perusahaan ini telah menjadi pemasok perangkat dan infrastruktur jaringan 5G pada 91 negara di wilayah Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan (Perez, 2021). Terlepas dari kesuksesannya dalam pengembangan 5G, Huawei secara konsisten mendapatkan penolakan di wilayah Amerika Serikat. Hal ini tidak lepas dari adanya ketidakpercayaan pemerintah Amerika terhadap Huawei yang sudah mengakar selama dua dekaade, akibat sejumlah kasus dugaan pencurian kekayaan intelektual dan upaya spionase yang dilakukan Huawei. Asumsi negatif juga datang akibat adanya kecurigaan pemerintah Amerika Serikat bahwa Huawei memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah dan militer Tiongkok, mengingat latar belakang pendiri yang merupakan mantan anggota *People's Liberation Army* (PLA) (Jeremy Wagstaff & Lee Chyen Yee, 2012). Permasalahan Huawei dengan Amerika Serikat menempatkan perusahaan di pusat persaingan Amerika-Tiongkok dalam ambisi mendominasi teknologi 5G. Hingga puncaknya, pada bulan Agustus 2020, melalui Departemen Luar Negeri, pemerintah Trump mengeluarkan inisiatif *Clean Network* yang isinya secara eksplisit menolak segala bentuk kehadiran teknologi dari Huawei, dan perusahaan teknologi Tiongkok lainnya, dalam pengembangan jaringan internet 5G di Amerika Serikat. Untuk menganalisis faktor penyebab dibentuknya kebijakan *Clean Network* oleh pemerintah Trump maka tulisan ini menggunakan teori Realisme Neoklasik yang menggabungkan antara analisis faktor tekanan struktural dan politik domestik dalam menjelaskan perilaku suatu negara.

Analisis Faktor Struktur Internasional: Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok dalam Ranah Teknologi dan Inovasi

Pada level sistemik internasional ditandai dengan persaingan antar negara (*interstate competition*). Kondisi ini menekankan pada konsep anarki, dimana tidak ada aktor yang lebih tinggi daripada negara sehingga masing-masing negara dapat bertindak menggunakan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan nasionalnya (Waltz, 2001). Dalam sistem internasional yang anarki ini maka satu-satunya cara untuk negara dapat bertahan hidup adalah dengan menyandarkan diri pada kekuatan nasional. Konsep kekuatan/kekuasaan (*power*) juga menjadi konsep sentral dalam pandangan realisme neoklasik. Di era modern saat ini, teknologi menjadi salah satu aspek penting dalam persaingan global. Hal ini disebabkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kekuatan produktif utama dari kekuatan ekonomi hingga militer. Inovasi teknologi menjadi aspek sentral yang dapat mempengaruhi *international influence* suatu negara. Kemampuan suatu negara untuk berinovasi dan menghasilkan teknologi canggih terbaru dapat sekaligus memberikan kekuatan ekonomi, kekuatan militer, dan manfaat *intangible* dari kepemimpinan yang dirasakan (Lewis, 2018).

Pasca Perang Dingin berakhir, Amerika Serikat hadir sebagai satu-satunya negara adidaya (*great power*). Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat memiliki kekuatan untuk membentuk peraturan global dengan cara yang mencerminkan pandangan, nilai, dan kepentingannya. Begitu pula dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi,

informasi, dan komunikasi, termasuk internet. Secara historis, pondasi awal dari perkembangan jaringan internet global saat ini bermula dari sebuah proyek pemerintah di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*U.S. Department of Defense*) yaitu ARPANET pada tahun 1958 (Abbate, 2000). Penemuan awal internet mengukuhkan posisi Amerika Serikat sebagai negara *first-mover* dalam teknologi jaringan nirkabel ini.

Amerika Serikat mendapatkan beberapa keuntungan dari posisinya sebagai negara pemimpin (*first-mover*) jaringan internet global. Pertama, memimpin dalam tata kelola internet (*internet governance*). Menyusul dengan kesadaran pemerintah dan swasta akan pentingnya jaringan internet, pendekatan desentralisasi terhadap internet mulai berubah. Komersialisasi internet menyebabkan dibutuhkan sebuah tata kelola (*internet governance*) untuk membangun dan menerapkan prinsip, norma, aturan, hingga prosedur pengambilan keputusan untuk mengatur penggunaan internet global. ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) menjadi organisasi yang memiliki wewenang untuk mengatur tata kelola dan mengelola infrastruktur internet global, mulai dari membuat *IP-address*, *domain* (DNS), hingga *root server*. Organisasi ini dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Perdagangan pada tahun 1998. Adanya dukungan keuangan juga berimplikasi pada pengawasan dan kontrol pemerintah Amerika Serikat terhadap organisasi ini. Salah satu kasusnya adalah kebijakan menghapus *domain* negara—Iran dan Kuba—karena melanggar sanksi dari Amerika Serikat (Kominfo, 2016). Tentunya, kontrol internet dari pemerintah Amerika Serikat ini mendapatkan banyak kecaman dari negara lain. Hingga pada tahun 2016, pemerintah Obama, menyetujui penyerahan kontrol tata kelola internet sepenuhnya (tanpa pengawasan dan campur tangan pemerintah Amerika) di bawah ICANN (Moyer, 2016). Keputusan ini juga bertujuan untuk mempertahankan tata kelola internet dibawah model *multi-stakeholder* yang seharusnya menghindari kontrol ekosistem internet oleh pemerintah tunggal manapun.

Kedua, keunggulan sebagai *first-mover* dalam teknologi yang dimiliki Amerika Serikat juga berdampak pada perusahaan teknologi Amerika yang dapat mengalokasikan sumber daya, membangun rantai industri dan menempati posisi hulu (*upstream*) dalam rantai pasok teknologi global untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan menopang kekuatan ekonomi Amerika. Hal ini salah satunya terlihat dari dominasi perusahaan Amerika dalam industri semikonduktor. Semikonduktor sendiri merupakan inti dari semua industri teknologi karena digunakan hampir di semua alat elektronik. Industri ini pula yang menjadi dasar dari kemajuan teknologi informasi saat ini dan di masa depan. Oleh karena itu, industri semikonduktor ini juga menjadi pusat persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Tabel 1. 10 Besar Perusahaan Semikonduktor (berdasarkan pendapatan 2020)

| COMPANY | HEADQUARTER LOCATION | OPERATING MODEL | 2020 REVENUE (in billion US\$) |
|----------|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Intel | United States | IDM | \$76.33 |
| Samsung | South Korea | IDM | \$61.85 |
| TSMC | Taiwan | Foundry | \$45.57 |
| SK Hynix | South Korea | IDM | \$27.08 |
| Micron | United States | IDM | \$22.54 |
| Qualcomm | United States | Fabless | \$19.36 |
| Nvidia | United States | Fabless | \$14.66 |
| Broadcom | United States | Fabless | \$17.74 |
| MediaTek | Taiwan | Fabless | \$10.99 |
| TI | United States | IDM | \$13.57 |

Sumber: (Statista, 2022) diolah oleh penulis

Pada tahun 2020, dari 10 besar perusahaan pemimpin industri semikonduktor, 6 diantaranya merupakan perusahaan asal Amerika Serikat. Hal ini menandakan bahwa industri semikonduktor didominasi oleh sekelompok kecil perusahaan, terutama perusahaan Amerika, yang telah mampu membangun keunggulan sebagai penggerak pertama. Sebagian besar perusahaan Amerika bergerak pada model bisnis *fabless*, dimana perusahaan semikonduktor hanya membuat dan menjual produk, tetapi tidak melakukan fabrikasi komponen semikonduktornya sendiri sehingga membutuhkan pabrik lain (*foundry*) untuk membuat komponen yang dibutuhkan. Sedangkan, perusahaan Intel sebagai pemimpin dalam industri semikonduktor global, menjalankan model bisnis IDM, dimana perusahaan melakukan semua aktivitas bisnis mulai dari perancangan, fabrikasi, hingga menjual produk terintegrasi. Kepemimpinan perusahaan Amerika dalam ranah semikonduktor menandakan bahwa negara ini masih memegang posisi kunci di hulu rantai pasok industri teknologi.

Tidak hanya dalam industri semikonduktor, perusahaan Amerika Serikat juga mendominasi sejumlah sektor telekomunikasi dan jaringan internet, mulai dari infrastruktur, *cloud computing*, hingga *software*. Perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat yang menjadi pemain utama dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur internet global yaitu AT&T dan Verizon. Selain itu, masih banyak lagi perusahaan teknologi Amerika yang sudah beberapa dekade menjadi perusahaan teratas global. Microsoft sebagai perusahaan terbesar di dunia dalam hal perangkat lunak yang berhasil mendominasi pasar *software* komputer global. Google, Facebook, Twitter, dan Instagram juga menjadi perusahaan konten internet terkemuka di dunia (O'Dea, 2022). Sedangkan Amerika terus berusaha mengukuhkan posisinya sebagai *first-mover* yang menciptakan dependensi teknologi secara global, kemajuan negara lain dalam pengembangan teknologi baru tentu dapat menjadi ancaman bagi posisi Amerika. Dalam sistem yang anarki negara-negara akan senantiasa melakukan perimbangan kekuatan dengan negara lain hingga menjadi yang terkuat.

Tiongkok sebagai *raising power*, memiliki ambisi untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terkuat dan pemimpin teknologi global yang dapat mengejar hegemoni Amerika Serikat. Lompatan Tiongkok yang pertama terlihat dalam ranah ekonomi. Menurut data *World Bank*, pada dekade pertama (2001-2010) sejak bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO), PDB Tiongkok bertumbuh dengan rata-rata 10.5%. Bahkan pada tahun 2010, PDB Tiongkok untuk pertama kalinya melampaui Jepang dengan nilai \$6.09 triliun (World Bank, 2022). Hal ini juga menjadi sejarah yang menandakan Tiongkok berhasil menggeser posisi Jepang, yang menduduki posisi ini selama empat dekade, sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, di bawah Amerika Serikat.

Perusahaan teknologi dari Amerika Serikat telah berinvestasi selama beberapa dekade di Tiongkok, membangun ekosistem produksi dan bisnis untuk memenuhi pasar yang berkembang. Namun, saat ini investasi tersebut dapat mengancam tatanan dunia yang berubah. Hal ini dikarenakan Tiongkok yang muncul sebagai saingan strategis dan geopolitik yang memaksa Washington untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya terhadap negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini. Terkait hal ini, Tiongkok memiliki ambisi untuk menjadi negara pemimpin teknologi global yang terlihat dari beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ambisi ini tertuang dalam rencana reformasi domestik hasil dari Komite Sentral PKT ke-18 tahun 2012. Pemerintahan Xi Jinping menamakannya sebagai tujuan *Two Centenaries Goals* (dua tujuan seratus tahun), yang menjadi dasar untuk mencapai *Chinese Dream*. Dimana pemerintah Jinping

bertekad melakukan peremajaan nasional bangsa untuk menjadikan Tiongkok sebagai negara pemimpin ekonomi dan teknologi global yang mandiri (Wang, 2014). Tujuan dari visi *Chinese Dream* ini kemudian dimanifestasikan ke dalam inisiatif *Silk Road Economic Belt* dan *Twenty-First-Century Maritime Silk Road*, atau yang kemudian lebih dikenal *Belt and Road Initiative* (BRI), pada tahun 2013. BRI tidak hanya digunakan sebagai investasi global Tiongkok untuk membangun jaringan infrastruktur kompleks yang menghubungkan dunia, tetapi juga telah meluas ke ranah jaringan internet, IoT, AI, *big data*, *smart cities*, pusat data, dan *cloud* di era ekonomi digital. Transisi ini dimulai dengan *Digital Silk Road* (DSR), diluncurkan pada tahun 2017, yang berkembang menjadi bagian penting dari BRI (He, 2022).

Lebih lanjut, pemerintah Tiongkok juga merangkum ambisi tersebut ke dalam *national blueprint Made in China 2025* (MIC 2025) yang dikeluarkan oleh *State Council of the People's Republic of China* pada tahun 2015. MIC 2025 menjadi rencana strategis nasional untuk mempromosikan dan mendorong kepemimpinan Tiongkok dalam inovasi sektor robotika, teknologi informasi, hingga energi bersih.

“China will be an innovative nation by 2020, an international leader in innovation by 2030, and a world powerhouse of scientific and technological innovation by 2050” (State Council, 2016).

MIC 2025 ini juga mengidentifikasi adanya upaya untuk menciptakan kemandirian Tiongkok, dimana ekonomi menjadi lebih bergantung pada pasar domestik dan kurang bergantung pada negara lain. Bagi Tiongkok, hal ini akan membantu membuat negaranya menjadi tidak terlalu rentan ketika berhadapan dan lebih mampu dalam bersaing dengan negara maju. Dengan kondisi tersebut, produk manufaktur Tiongkok akan memiliki persaingan yang lebih ketat dengan negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang.

Sejak dikeluarkan pada tahun 2015, MIC 2025 menjadi perhatian dari Amerika karena menciptakan upaya proteksionisme yang cukup diskriminatif terhadap perusahaan teknologi asing di Tiongkok. Menurut laporan dari *U.S. Trade Representative* bagian 301, pemerintah Tiongkok menggunakan persyaratan usaha patungan (*joint venture/JV*), pembatasan investasi asing, serta tinjauan administratif dan proses perizinan untuk mendorong transfer teknologi dari perusahaan Amerika (*U.S. Trade Representative*, 2018). Kebijakan investasi asing Tiongkok mengamanatkan bahwa perusahaan asing yang ingin beroperasi di dalam negeri harus bermitra dengan perusahaan lokal melalui JV dan mengharuskan mitra asingnya melakukan transfer teknologi dan pengetahuan. Tentu kebijakan ini membawa keuntungan besar bagi Tiongkok. Data dari Badan Promosi Investasi Tiongkok, yang beroperasi di bawah Kementerian Perdagangan, menunjukkan lebih dari 6.000 JV dengan mitra asing didirikan, dengan nilai sekitar \$27,8 miliar aliran FDI ke Tiongkok hanya pada tahun 2015. Persyaratan “pelokalan” perusahaan teknologi asing di Tiongkok juga didukung dengan berlakunya Undang-Undang Keamanan Siber Tiongkok 2017, yang mengharuskan data dari perusahaan teknologi asing disimpan secara lokal. Dampaknya Tiongkok menjadi negara pusat data (*internet data center*) dunia. Bagi perusahaan asing kebijakan ini merupakan hambatan karena memaksa perusahaan teknologi asing untuk berinvestasi di server data baru yang tunduk pada pemeriksaan langsung pemerintah Tiongkok, atau menyewa penyedia server lokal seperti seperti Huawei, Tencent, atau Alibaba (O’Connor, 2019).

Bersama dengan kebijakan industri MIC 2025, pemerintah Tiongkok mengeluarkan inisiatif *China Standards 2035 Plan*, yang menjadi langkah berikutnya untuk menetapkan standar global terhadap teknologi generasi terbaru seperti 5G, IoT dan

AI (Koty, 2020). Dari rencana ini, pemerintahan Tiongkok menyadari akan pentingnya spesifikasi standar dalam persaingan industri teknologi. Dimana selain membuat suatu produk lebih mudah diproduksi secara massal, standar juga dapat menjadi keuntungan dari kepemilikan hak paten. Bukti keseriusan pemerintah Tiongkok untuk menguasai standar dan paten teknologi global terlihat dari laporan *World Intellectual Property Indicators* pada tahun 2020.

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Paten dari Tiga Negara Tahun 2018-2019

| Patents | 2018 | 2019 | Growth rate (%) | Share of world total (%) |
|------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|
| Applications worldwide | 3,325,400 | 3,224,200 | -3.0 | 100.0 |
| China | 1,542,002 | 1,400,661 | -9.2 | 43.4 |
| U.S. | 597,141 | 621,453 | 4.1 | 19.3 |
| Japan | 313,567 | 307,969 | -1.8 | 9.6 |

Sumber: (WIPO, 2020)

Data diatas menunjukkan bahwa *China National Intellectual Property Administration* (CNIPA) menerima 1,4 juta aplikasi paten kekayaan intelektual pada tahun 2019. Meskipun terjadi penurunan substansial dari tahun sebelumnya, namun ini tidak berpengaruh terhadap posisi Tiongkok sebagai negara dengan jumlah paten kekayaan intelektual tertinggi pada tahun 2019. Angka ini lebih dari dua kali lipat jumlah yang diterima oleh Amerika Serikat. Di antara ketiga negara tersebut, pangsa pasar Tiongkok dari total dunia telah meningkat pesat selama sepuluh tahun terakhir, dari 17% pada 2009 menjadi 43,4% pada 2019. Selain itu, Tiongkok juga naik dari posisi ketiga pada tahun 2009 dan mengklaim posisi teratas pada tahun 2011 hingga 2020 .

Ambisi-ambisi dari pemerintah Tiongkok dengan tepat memprovokasi kecemasan Amerika Serikat atas kemunculan Tiongkok sebagai *technological powerhouse* yang menyaingi kepemimpinannya. Dampaknya eskalasi persaingan menjadi semakin meningkat antara dua negara ini, khususnya pada masa pemerintahan Trump, yang kemudian mendorong langkah *decoupling* atau pemisahan ekosistem ekonomi dan teknologi kedua negara. Upaya pemisahan ini terlihat jelas dalam *trade-war* yang diinisiasi oleh pemerintah Trump melalui sanksi, peningkatan tarif, pembatasan ekspor, penarikan lisensi, khususnya terhadap produk teknologi. Bahkan Trump meminta untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk mencari alternatif lain selain Tiongkok dan kembali melakukan produksi di Amerika Serikat (CNBC, 2019). Efeknya yang paling merugikan dari adanya pemisahan perdagangan dan teknologi antar kedua negara adalah perpecahan dalam rantai industri global yang akan mengakibatkan munculnya dua pasar yang bersaing. Dalam kaitannya dengan *5G race*, persaingan ini dapat menciptakan perpecahan dalam *supply chain* teknologi 5G, dan lebih jauh menciptakan dimensi baru dalam persaingan geopolitik antar kedua negara.

Analisis Faktor Domestik dalam Pembentukan Kebijakan *Clean Network* pada Masa Pemerintahan Trump

Sebelum mengeluarkan kebijakan luar negeri sebagai bentuk respon, tekanan struktur internasional ini perlu disaring atau diterjemahkan oleh faktor politik domestik. Variabel domestik yang sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri adalah persepsi elit politik yang terlibat dalam perumusan kebijakan tersebut. Selain proses persepsi, realisme neoklasik juga menganalisis dinamika dalam politik domestik lainnya seperti polarisasi dalam institusi politik domestik dan masyarakat (Ripsman et al., 2016). Faktor domestik

ini yang membuat pada akhirnya masing-masing negara dapat mengambil strategi dan kebijakan yang berbeda meskipun dihadapkan pada *structural constraint* yang sama (Rose, 1998).

Proses Persepsi dari Elit Politik

Menurut Ripsman, proses persepsi merupakan fase pertama dimana rangsangan sistemik diinterpretasikan untuk kemudian menghasilkan respon berupa kebijakan luar negeri (Ripsman et al., 2016). Di dalam proses politik Amerika, presiden merupakan aktor inti dalam lingkaran pembuatan kebijakan luar negeri. Oleh sebab itu, persepsi presiden Amerika Serikat menjadi penting untuk dianalisis karena merupakan aktor pembuat kebijakan luar negeri yang penting. Sebagai fase pertama dimana rangsangan sistemik diinterpretasikan, proses persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internasional (eksternal) tetapi juga hasil dari citra pemimpin dan budaya strategis negara.

Pertama, citra Presiden Trump dipengaruhi oleh latar belakang, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianutnya. Sejak awal masa kampanye, Trump kerap menyinggung korelasi kuat antara penurunan kekuatan material Amerika Serikat dalam sistem internasional dengan kebijakan luar negeri negara. Pada pidato kampanyenya pada 27 April 2016, Trump secara langsung menyebut kebijakan luar negeri Obama sebagai penyebab melemahnya kekuatan Amerika secara drastis, melalui pengeluaran negara yang boros, utang luar negeri yang besar, pertumbuhan yang rendah, perbatasan yang terbuka, serta defisit perdagangan (New York Times, 2016). Dampaknya terjadi penurunan ‘kehormatan’ Amerika di mata dunia. Oleh karena itu, menurut Trump, diperlukan kebijakan luar negeri yang dapat mengembalikan kehormatan Amerika di mata dunia atau yang disebut “*Make America Great Again*.” Untuk mewujudkan tujuan ini maka Trump membuat agenda “*America First*” terhadap kebijakan luar negeri dan perdagangan, yang berfokus pada pengurangan defisit perdagangan dan menyeimbangkan kembali dalam aliansi. Agenda *America First* menggambarkan pandangan Trump yang penuh kecurigaan, skeptisisme, dan lebih berfokus pada kehormatan. Dalam kaitannya dengan hubungan luar negeri, skeptisisme ini berimplikasi pada sikap tidak percaya Trump terhadap negara lain—yang tidak hanya ditujukan terhadap negara lawan saja tetapi juga sekutu Amerika Serikat.

Pendekatan-pendekatan Trump dalam menafsirkan politik global juga dipengaruhi oleh latar belakang hidupnya sebagai seorang pengusaha dan tanpa pengalaman politik. Latar belakangnya sebagai pengusaha membuat Trump memiliki cara pandang bahwa hidup adalah kompetisi—tentang ‘menang’ atau ‘kalah’. Sejalan dengan logika tentang bisnis, Trump percaya bahwa masalah yang dihadapi Amerika adalah kurangnya kemenangan (Wolf, 2017). Trump telah membuat banyak pernyataan dan publikasi mengenai hal ini. Bahkan, persoalan mengenai kemunduran Amerika dalam tatanan global juga dibawa dalam pidato pencalonannya sebagai presiden Amerika pada tahun 2015.

“Our country is in serious trouble. We don’t have victories anymore. We used to have victories, but we don’t have them” (TIME, 2015).

Dari pernyataan tersebut, Trump melihat Amerika sebagai negara yang terus-menerus mengalami kekalahan. Keyakinan Trump mengenai ‘menang’ dan ‘kalah’ dalam hubungan luar negeri juga terkait dengan *zero-sum mentality*. *Zero-sum mentality* sangat mewakili pandangan Trump terhadap perdagangan internasional, di mana setiap negara menang dan kalah dalam ukuran yang sama. Setiap dolar yang dihabiskan Amerika untuk membeli barang-barang dari luar negeri adalah dolar yang hilang dari negara itu. Dalam konteks politik luar negeri, Trump ingin mengubah kesepakatan yang

dibuat oleh para pendahulunya dan menggunakan jenis taktik bisnis yang agresif untuk memaksa negara-negara lain untuk berkompromi pada kesepakatan baru. Sanksi ekonomi menjadi cara yang Trump percaya dapat menunjukkan kekuatan Amerika dan memaksa negara lain untuk mengikuti caranya.

Kedua, budaya strategis negara. Agenda *America First* dari Trump membawa arah kebijakan strategi Amerika tidak sejalan dengan *grand strategy* tradisional, yang mendorong multilateralisme dan ekonomi pasar bebas. Sedangkan, pada masa pemerintahan Trump arah strategi negara mengarah pada *selective-isolationism*. Yang mana Trump mengarahkan kebijakan luar negeri Amerika pada unilateralisme, pengurangan komitmen internasional yang dinilai merugikan kepentingan nasional.

Akibat dari hasil citra presiden dan budaya strategis di atas menghasilkan persepsi negatif Trump terhadap kebangkitan ekonomi dan teknologi Tiongkok. Hal ini diperkuat dengan adanya data yang menunjukkan defisit perdagangan antara Amerika-Tiongkok yang terus mengalami pelebaran. Tahun 2018, defisit perdagangan barang Amerika dan Tiongkok mencetak rekor baru \$419,2 miliar, naik dari \$375,6 miliar pada 2017, atau mengalami meningkat \$43,6 miliar (U.S. Census Bureau, 2018). Di bawah keyakinan Trump, defisit perdagangan yang dialami Amerika pada tahun 2018 dengan Tiongkok sudah jelas menjadi kondisi yang sangat buruk. Trump juga mempercayai bahwa kemajuan ekonomi dan teknologi, diperoleh Tiongkok dari adanya praktik curang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dengan adanya kebijakan MIC 2025 dan *China Standar 2035* telah mempersulit perusahaan teknologi Amerika yang beroperasi di Tiongkok. Oleh karena itu, kebijakan *anti-China*, termasuk memberikan sanksi ekonomi merupakan tindakan yang tepat untuk menunjukkan *power* dari Amerika Serikat.

Decision-making: Polarisasi Politik Domestik

Proses *decision-making* yang dilakukan pemerintah sangat dipengaruhi oleh variabel hubungan masyarakat dan institusi politik dalam negeri (*state-society relations*). Komponen kunci dalam melihat *state-society relations* adalah polarisasi dalam politik domestik (Ripsman et al., 2016).

Isu mengenai keamanan nasional dari jaringan internet 5G Tiongkok di Amerika Serikat, mendapatkan dukungan penuh dari Kongres. Hal ini terlihat dari dukungan bipartisan dalam Kongres ke-116. Setidaknya Kongres mengeluarkan 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait dengan Tiongkok. Beberapa hal diantaranya mengenai persetujuan Kongres untuk menaikkan dana pengeluaran untuk peningkatan kemampuan militer Amerika di kawasan Asia-Pasifik, serta memperkuat infrastruktur keamanan domestik terhadap ancaman siber. Khusus terkait dengan ranah teknologi dan keamanan, Kongres mengeluarkan *P.L.116-129: Secure 5G and Beyond Act of 2020*. Isi dari RUU ini menekan Presiden, dalam konsultasi dengan lembaga federal terkait, untuk mengembangkan strategi untuk mengamankan dan melindungi sistem dan infrastruktur generasi internet kelima (5G) Amerika. Selain itu, membantu sekutu dan mitra strategis dalam memaksimalkan keamanan sistem, infrastruktur, dan perangkat lunak telekomunikasi 5G (Kennedy, 2020). Menindaklanjuti RUU tersebut, pada bulan Maret 2020, Presiden Trump mengesahkan undang-undang *Secure 5G and Beyond Act of 2020*.

Realisme neoklasik tidak hanya melihat polarisasi dalam institusi politik domestik, tetapi juga melihat polarisasi dalam masyarakat. Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan representasi terhadap citra rakyat Amerika yang negatif mengenai Tiongkok, yang mana hal ini mendukung persepsi Trump. Menurut survei dari Pew Research Center ada tahun 2019 sekitar 60% rakyat Amerika memiliki pendapat yang tidak baik terkait Tiongkok, meningkat 13% dari tahun 2018. Pendapat negatif ini

sebagian besar disebabkan karena kekhawatiran masyarakat Amerika akan peningkatan kekuatan Tiongkok, yang dianggap memiliki pengaruh buruk bagi negara oleh sekitar 81% rakyat Amerika. Masyarakat Amerika juga semakin melihat Tiongkok sebagai ancaman. Sekitar 24% masyarakat menyebut Tiongkok sebagai negara atau kelompok yang menimbulkan ancaman terbesar bagi Amerika Serikat di masa depan, dua kali lebih banyak dari yang dikatakan sama pada tahun 2007 (Silver et al., 2019). Peningkatan pandangan negatif masyarakat Amerika terhadap Tiongkok mendukung persepsi Trump, yang akhirnya dapat mendukung pendekatan keamanan yang lebih ketat terhadap Tiongkok.

Policy Implementation

Implementasi kebijakan luar negeri Trump terhadap Tiongkok, awalnya dapat dikaji melalui dokumen resmi yang memuat strategi dan pedoman umum pemerintah Trump yaitu *National Security Strategy* (NSS). Pemerintahan Trump mengeluarkan laporan NSS pada Desember 2017. Kebijakan luar negeri Amerika terhadap Tiongkok di dalam NSS 2017 menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan dengan NSS 2015 (pemerintahan Obama). Setidaknya 33 kali kata “*China*” disebutkan dalam NSS 2017, sedangkan pada NSS 2015 kata ini hanya disebutkan sebanyak 12 kali.

“For decades, U.S. policy was rooted in the belief that support for China’s rise and for its integration into the post-war international order would liberalize China. Contrary to our hopes, China expanded its power at the expense of the sovereignty of others” (NSS, 2017).

Hal ini menunjukkan adanya perhatian lebih pemerintah Trump terhadap kebangkitan kekuatan Tiongkok secara global. NSS 2017 mendefinisikan Tiongkok sebagai “kekuasaan revisionis” yang berambisi untuk memperluas pengaruh ekonomi dan militer secara global.

Perhatian pemerintah Trump terhadap Tiongkok semakin meningkat dengan adanya defisit perdagangan bilateral, terutama pada produk teknologi. Hingga pada awal tahun 2018, *trade war* dimulai. Pemerintah Amerika Serikat mulai memprakarsai tindakan keras terhadap Huawei, ZTE dan perusahaan telekomunikasi Tiongkok lainnya, dengan melarang perangkat mereka untuk digunakan oleh pemerintah federal. Intervensi pemerintah dapat dilihat mulai dari bulan Januari tahun 2018, dimana perusahaan AT&T dan Verizon membatalkan rencana penjualan Huawei karena masalah keamanan yang ditekankan pemerintah Amerika Serikat.

Pada tahun 2019, Departemen Kehakiman menyimpulkan Huawei terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan keamanan nasional dan kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui kerjasamanya dengan Iran. Hal ini semakin meningkatnya kekhawatiran Amerika Serikat dengan Tiongkok, dimana perusahaan teknologi Tiongkok dianggap tidak hanya dapat mengancam keamanan nasional tetapi juga kepentingan nasional Amerika Serikat. Pemerintah kemudian mengeluarkan larangan bagi perusahaan Amerika untuk berbisnis dengan Huawei tanpa izin dari pemerintah. Pada bulan Mei 2019, Trump menandatangani perintah eksekutif (*Executive Order*) yang memungkinkan pihak berwenang Amerika Serikat untuk memblokir perusahaan Amerika yang akan melakukan bisnis dengan perusahaan asing yang dianggap dapat menimbulkan risiko bagi ancaman keamanan (*Executive Order 13873*, 2019). Menindaklanjuti perintah eksekutif tersebut, secara efektif pada 16 Mei 2019, Huawei dan ratusan afiliasinya ditambahkan *Department of Commerce* ke dalam *Entity List*, yang melarang ekspor, ekspor ulang, dan transfer yang melibatkan entitas yang ditunjuk tanpa lisensi khusus. Hal ini kemudian berdampak pada perusahaan Google, Qualcomm, Intel dan ARM yang menangguk

bisnis dengan Huawei untuk mematuhi larangan tersebut (Pearlstine et al., 2019).

Pada tahun 2019, pemerintah Trump juga mulai meletakkan perhatian lebih terhadap pengembangan teknologi 5G Tiongkok. Sebagai tindakan lanjutan dari undang-undang *Secure 5G and Beyond Act of 2020* yang mendapat dukungan bipartisan dari Kongres. Pemerintah Trump kemudian mulai menyusun beberapa kebijakan strategis lanjutan untuk mengimplementasikan isi dari undang-undang tersebut. Pemerintah mengeluarkan *blue print* yang disebut *National Strategy to Secure 5G*. Tujuannya adalah untuk mengartikulasikan visi “...for America to lead the development, deployment, and management of secure and reliable 5G communications infrastructure worldwide, arm-in-arm with our closest partners and allies...” Langkah-langkah yang disiapkan pemerintah dengan memfasilitasi peluncuran 5G domestik, menilai risiko dan mengidentifikasi prinsip-prinsip keamanan inti untuk infrastruktur 5G, mengelola risiko terhadap keamanan ekonomi dan nasional dari penggunaan infrastruktur 5G, serta mempromosikan pengembangan jaringan dan infrastruktur 5G global yang bertanggung jawab (NTIA, 2021).

Sebagai implementasi lanjutan dari *National Strategy to Secure 5G*, pemerintah mengeluarkan upaya bipartisan melalui kebijakan yang dinamakan *Clean Network*. Inisiatif ini merupakan pendekatan komprehensif yang dikeluarkan oleh pemerintahan Trump dalam menjaga aset negara termasuk privasi warga negara dan informasi paling sensitif dari perusahaan Amerika dari “aktor jahat”, seperti Partai Komunis Tiongkok (U.S. Department of State, n.d.). Pada 5 Agustus 2020, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, menyatakan bahwa program *Clean Network* akan memiliki prioritas pada *clean carrier, clean apps, apps store, clean cloud*, serta *clean cable* (U.S. Department of State, 2020). Inisiatif *Clean Network* tidak hanya berusaha menekan keberadaan teknologi Tiongkok di jaringan telekomunikasi nasional, tetapi juga menekan para negara sekutu untuk tidak menggunakan teknologi Huawei dalam pembangunan infrastruktur dan jaringan komunikasi 5G di wilayah mereka. Hal ini didasari dengan alasan keamanan nasional, dimana adanya kekhawatiran bahwa pemerintah Tiongkok dapat melakukan kegiatan mata-mata melalui perangkat Huawei (DW, 2019). Seruan untuk memblokir Huawei juga secara khusus ditujukan untuk aliansi intelijen “*Five Eyes*” yang terdiri Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia dan Selandia Baru. Hal ini kemudian berdampak pada pembatalan sejumlah kontrak Huawei di beberapa negara.

Melalui *Clean Network*, pemerintah Trump juga bekerjasama dengan pihak swasta dan mitra pemerintah internasional untuk membentuk dan mempromosikan rantai pasokan teknologi dan lalu lintas jaringan 5G yang aman dan terpercaya. Hingga tanggal 10 Agustus 2020, pemerintah Amerika Serikat mengklaim bahwa program inisiatifnya ini telah berkembang pesat dengan sekitar 30 negara lain bersama dengan perusahaan telekomunikasi bergabung di dalamnya. Negara-negara yang diklaim oleh Amerika Serikat telah ikut bergabung dalam *Clean Network* antara lain Albania, Australia, Kanada, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Prancis, Yunani, Israel, Jepang, Latvia, Norwegia, Polandia, Rumania, Slovenia, Swedia, Taiwan, Inggris, hingga Vietnam. Adapun, beberapa perusahaan teknologi di sejumlah negara juga disebutkan telah bergabung dalam program ini dan menjadi “perusahaan bersih” atau “*Clean Telcos*” yang menolak kerjasama bisnis dengan Huawei. *Clean telcos* ini diantaranya Orange dari Prancis, SK dan KT dari Korea Selatan, Telstra di Australia, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Kebijakan *Clean Network* merupakan hasil integrasi dari faktor tekanan struktur

internasional dan proses interpretasi dalam politik domestik. Faktor tekanan struktural internasional disebabkan karena adanya perubahan distribusi kekuatan relatif antara Amerika dan Tiongkok yang kemudian meningkatkan eskalasi persaingan antar negara. Pertama, kekhawatiran Amerika meningkat karena adanya fenomena kebangkitan ekonomi Tiongkok. Kedua, pemerintah Tiongkok menunjukkan sejumlah ambisi untuk menjadikan Tiongkok sebagai *technological powerhouse* melalui *Digital Silk Road* (perluasan ranah dari BRI), *Made in China 2025*, hingga *China Standards 2035*. Ambisi ini dapat mengancam posisi Amerika yang selama beberapa dekade menjadi negara pemimpin dalam pengembangan teknologi global. Ketiga, sengketa antar kedua negara juga meningkat karena sejumlah hambatan dan tekanan diberikan pemerintah Tiongkok terhadap perusahaan teknologi asing yang ingin beroperasi di negaranya. Kontrol ini seperti mengharuskan perusahaan asing untuk membentuk usaha patungan dan melakukan transfer IP serta teknologi terhadap perusahaan lokal Tiongkok, serta patuh terhadap pengawasan pemerintah di bawah Undang-Undang Keamanan Siber Tiongkok 2017. Keempat, peningkatan kekhawatiran Amerika terhadap perusahaan Huawei yang sudah mengakar selama dua dekade setelah Departemen Kehakiman menyimpulkan bahwa Huawei memiliki kerjasama rahasia dengan Iran. Hal ini bertentangan dengan kepentingan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Ancaman struktural kemudian diterjemahkan oleh faktor domestik, sebelum akhirnya mengeluarkan kebijakan sebagai respon akan tekanan eksternal tersebut. Persepsi pemimpin (presiden) menjadi faktor yang penting dalam politik domestik. Presiden Trump telah lama menunjukkan perhatiannya akan kebangkitan Tiongkok sebagai ancaman bagi kepentingan dan keamanan nasional. Persepsi negatif ini timbul karena nilai-nilai filosofi yang dipegang Trump penuh kecurigaan, skeptis, dan mengejar kemenangan. Keyakinan filosofis berimplikasi pada pendekatan yang diambilnya dalam ranah kebijakan luar negeri yang berfokus pada unilateralisme dan membangun kembali kekuatan Amerika. Selain itu, arah budaya strategis *selective-isolationism* juga mempengaruhi arah kebijakan Trump yang *anti-China*. Polarisasi dalam masyarakat dan institusi politik domestik tidak terlihat dalam proses pembentukan kebijakan keamanan nasional yang dikeluarkan pemerintahan Trump untuk menghadapi ancaman Tiongkok. Kongres menunjukkan dukungan terhadap isu keamanan nasional terkait 5G Tiongkok dengan dikeluarkannya *P.L.116-129: Secure 5G and Beyond Act of 2020*, yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Lebih lanjut, ini yang kemudian mendorong dibentuknya *Clean Network* sebagai upaya bipartisan pemerintah Trump untuk melindungi seluruh jaringan dan infrastruktur 5G di Amerika Serikat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D selaku dosen pembimbing 1, Bapak Marten Hanura, S.IP, M.P.S. selaku dosen pembimbing 2 dan Bapak Muhammad Faizal Alfian, S.I.P., M.A. selaku dosen penguji 1 yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Abbate, J. (2000). *Inventing the Internet*. 328.
- Arinanda, B. P., Windiani, R., & Paramasatya, S. (2022). Perang Teknologi Amerika Serikat vs Tiongkok: Kebijakan Penolakan Teknologi 5G Huawei Tiongkok oleh Amerika Serikat. *Journal of International Relations*, 8(2), 72–81.

- Campion, A. S. (2020). From CNOOC to Huawei: Securitization, the China threat, and critical infrastructure. *Asian Journal of Political Science*, 28(1), 47–66. <https://doi.org/10.1080/02185377.2020.1741416>
- CNBC. (2019, April 14). *CNBC Transcript: Ren Zhengfei, Huawei Founder and CEO*. CNBC. <https://www.cnbc.com/2019/04/15/cnbc-transcript-ren-zhengfei-huawei-founder-and-ceo.html>
- DW. (2019, May 17). Pemimpin Eropa: Kami Tidak Akan Ikut Langkah Trump Larang Huawei. *Deutsche Welle*. <https://p.dw.com/p/3IdnF>
- Executive Order 13873. (2019). <https://www.federalregister.gov/documents/2019/05/17/2019-10538/securing-the-information-and-communications-technology-and-services-supply-chain>
- He, A. (2022). *The Digital Silk Road and China's Influence on Standard Setting*. 40.
- Jeremy Wagstaff & Lee Chyen Yee. (2012, April 23). *Insight: Outsider Ren pits Huawei against the world*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-huawei-ren-idUSBRE83M0C620120423>
- Kennedy, S. (2020). *Thunder Out of Congress on China*. Center for Strategy and International Studies. <https://www.csis.org/blogs/trustee-china-hand/thunder-out-congress-china>
- Kim, M., Lee, H., & Kwak, J. (2020). The changing patterns of China's international standardization in ICT under techno-nationalism: A reflection through 5G standardization. *International Journal of Information Management*, 54, 102145. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102145>
- Kominfo. (2016, May 31). *ICANN dan Tata Kelola Internet Global*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. <https://aptika.kominfo.go.id/2016/05/icann-dan-tata-kelola-internet-global/>
- Koty, A. C. (2020, July 2). *What is the China Standards 2035 Plan and How Will it Impact Emerging Industries?* China Briefing: From Dezan Shira Associate. <https://www.china-briefing.com/news/what-is-china-standards-2035-plan-how-will-it-impact-emerging-technologies-what-is-link-made-in-china-2025-goals/>
- Lewis, J. A. (2018). *Technological Competition and China* [Report of Center for Strategic and International Studies (CSIS)]. CSIS. <https://www.csis.org/analysis/technological-competition-and-china>
- Moyer, E. (2016, October 1). *US hands internet control to ICANN*. CNET. <https://www.cnet.com/tech/services-and-software/us-internet-control-ted-cruz-free-speech-russia-china-internet-corporation-assigned-names-numbers/>
- New York Times. (2016, April 27). *Transcript: Donald Trump's Foreign Policy Speech*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2016/04/28/us/politics/transcript-trump-foreign-policy.html>
- NSS. (2017). *National Security Strategy of the United States of America 2017*. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>
- NTIA. (2021). *National Strategy to Secure 5G Implementation Plan*. https://www.ntia.gov/files/ntia/publications/2021-1-12_115445_national_strategy_to_secure_5g_implementation_plan_and_annexes_a_f_final.pdf
- O'Connor, S. (2019). *How Chinese Companies Facilitate Technology Transfer from the United States*. U.S.-China Economic and Security Review Commission.

- <https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/How%20Chinese%20Companies%20Facilitate%20Tech%20Transfer%20from%20the%20US.pdf>
- O’Dea, S. (2022). *Telecommunication operators/companies worldwide by revenue in 2020 (in billion euro)*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/221382/revenue-of-top-30-global-telecommunication-operators/>
- Pearlstine, N., Krishnakumar, P., & Pierson, D. (2019, December 19). *THE WAR AGAINST HUAWEI*. Los Angeles Times. <https://www.latimes.com/projects/la-fg-huawei-timeline/>
- Perez, C. (2021, February 23). 5G EXPLAINED PART TWO: THE COMPETITIVE LANDSCAPE. *Foreign Policy (FP)*. <https://foreignpolicy.com/2020/02/24/5g-cellular-huawei-china-networks-supply-chain-competitive-landscape-power-map/#>
- Pohlmann, T. (2019). *Who is leading the 5G patent race?: A patent landscape analysis on declared 5G patents and 5G standards contributions*. https://www.iplytics.com/wp-content/uploads/2019/01/Who-Leads-the-5G-Patent-Race_2019.pdf
- Ripsman, N. M., Taliaferro, J. W., & Lobell, S. E. (2016). *Neoclassical realist theory of international politics*. Oxford University Press.
- Rose, G. (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. *World Politics*, 51(1), 144–172. <https://doi.org/10.1017/S0043887100007814>
- Silver, L., Devlin, K., & Huang, C. (2019). *U.S. Views of China Turn Sharply Negative Amid Trade Tensions*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/global/2019/08/13/u-s-views-of-china-turn-sharply-negative-amid-trade-tensions/>
- State Council. (2016, May 20). *Guideline for China’s innovation-driven development published*. The State Council The People’s Republic of China. http://english.www.gov.cn/policies/latest_releases/2016/05/20/content_281475353682191.htm
- Statista. (2022). *Leading semiconductor companies (including foundries) from 2019 to 2021, by sales revenue*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/283359/top-20-semiconductor-companies/>
- TIME. (2015, June 16). *Here’s Donald Trump’s Presidential Announcement Speech*. TIME. <https://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/>
- U.S. Census Bureau. (2018). *Trade in Goods with China*. United States Census Bureau. <https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html>
- U.S. Department of State. (n.d.). *The Clean Network*. U.S. Department of State. <https://2017-2021.state.gov/the-clean-network/index.html>
- U.S. Department of State. (2020, August 5). *Secretary Michael R. Pompeo At a Press Availability*. U.S. Department of State. <https://2017-2021.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-at-a-press-availability-10/index.html>
- U.S. Trade Representative. (2018). *USTR 301 Fact Sheet*. <https://ustr.gov/sites/default/files/USTR%20301%20Fact%20Sheet.pdf>
- Waltz, K. N. (2001). *Man, the state, and war: A theoretical analysis*. Columbia University Press.
- Wang, Z. (2014). The Chinese Dream: Concept and Context. *Journal of Chinese Political Science*, 19(1), 1–13. <https://doi.org/10.1007/s11366-013-9272-0>
- WIPO. (2020). *World Intellectual Property Indicators 2020*. World Intellectual Property

- Organization. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2020.pdf
- Wolf, R. (2017). Donald Trump's Status-Driven Foreign Policy. *Survival*, 59(5), 99–116. <https://doi.org/10.1080/00396338.2017.1375260>
- World Bank. (2022). *GDP (current US\$)—United States, Japan, China*. World Bank. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?contextual=default&end=2020&locations=US-JP-CN&start=2000&view=chart>